

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
JL. DAHLIA NO. 01 TELP. (0541) 743307
SAMARINDA 75121**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan program dan kegiatan tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. LKjIP tahun 2023 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2023 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran yakni meningkatinya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Secara umum DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Khusus pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DP2PA yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DP2PA dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang didasari oleh Rencana Strategis DP2PA tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja, Laporan Kinerja ini merupakan instrument untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DP2PA yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 7(tujuh) Program, 17(tujuh belas) Kegiatan dan 37(tigapuluhtujuh) Sub Kegiatan, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pada Tahun 2023 berdasarkan RENSTRA DP2PA Kota Samarinda telah ditetapkan 4(empat) sasaran strategis dan indicator kinerja yang harus dicapai. Berikut disajikan tabel capaian kinerja dari DP2PA Kota Samarinda yang berhasil dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur DP2PA Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data.

Guna menghadapi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DP2PA, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Strategi dan arah kebijakan Renstra disepakati oleh Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Perangkat Daerah diperkenankan mengubah atau mengganti program yang kurang memiliki tujuan atau goals ke program yang lebih tepat.
3. Sasaran adalah *outcome* dari program atau kegiatan sub kegiatan.
4. Sosialisasi Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berusaha terintegrasi secara digitalisasi.
5. Perbaikan sistem pengendalian internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP.

Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Pada Tahun 2023 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2023 dan seterusnya akan di tingkatkan capaian kinerjanya.

Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini dapat disusun.

Tujuan pembuatan Laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Hal tersebut sangat terkait dengan salah satu agenda penting Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan Pemerintah saat ini yaitu perbaikan tata kelola Pemerintahan (*goodgovernance*).

Selain berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public dalam hal ini warga dan masyarakat Kota Samarinda melalui Lembaga /Instansi yang berwenang, lakip juga sangat penting sebagai alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*.

Lakip disusun oleh Tim Perumus Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 ,Rencana Strategis, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023, dengan menyajikan gambaran tentang realisasi keuangan dan capaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Tim Penyusunan LAKIP menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan laporan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Demikian laporan ini dibuat, mudah-mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan semoga bermanfaat bagi Pemerintah Kota Samarinda.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Samarinda, 29 Februari 2024

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1. Umum	3
2. Maksud Dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup.....	3
1.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
1. Tugas Pokok.....	4
2. Fungsi.....	4
3. Tata organisasi	5
4. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana DP2PA.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi Dan Misi	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.3 Perencanaan Keuangan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja	20
3.2 Akuntabilitas Keuangan	40
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2023	47
3.4 Inovasi	59
BAB IV PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	6

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Keseluruhan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	7
Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	7
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjurangan Per Desember 2023.....	8
Tabel 1.4 Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023.....	8
Tabel 1.5 Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023.....	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 2023.....	14
Tabel 2.2 Anggaran Tahun 2023.....	15
Tabel 2.3 Belanja pada DP2PA (Pagu APBD-P) Tahun 2023.....	16
Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Pagu APBD-P) Tahun 2023.....	16
Tabel 3.1 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Sasaran 1).....	22
Tabel 3.2 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Sasaran 2).....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Sasaran 3).....	25
Tabel 3.4 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Data Gender.....	27
Tabel 3.5 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Peningkatan Kualitas Keluarga.....	29

Tabel 3.6 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Pemenuhan Hak Anak.....	34
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Tidak Langsung Perubahan DP2PA Tahun 2023.....	40
Tabel 3.8 Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023.....	41
Tabel 3.9 Anggaran Belanja Langsung (Rutin) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023.....	45
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Anggaran (Pagu APBDP) Tahun 2023	47

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun). Jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan RPJMD, RPJPD dan RKPD. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategik yang akan mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasal 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka peningkatan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerah, oleh sebab itu perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya.

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014, laporan kinerja merukan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja.

Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang diorientasikan pada pendekatan dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan daerah Provinsi dan kebijakan umum nasional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan

urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mencapai fungsi tersebut, maka indikator kinerja DP2PA Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG;
2. Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan;
3. Persentase penurunan jumlah kasus;
4. IKM.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DP2PA Kota Samarinda pada Tahun anggaran 2023 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 9.284.875.368,-** (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah **Rp. 4.707.716.135,-** (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Langsung Kegiatan sejumlah **Rp. 2.967.128.500,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Belanja Langsung (rutin) sejumlah **Rp. 1.610.030.733,-** (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol dari kegiatan-kegiatan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2023 dan penilaian

kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan kinerja (Lkj) tahun 2023 ini mengenai kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan urutan pembahasan adalah :

- a. Pendahuluan
- b. Perencanaan Kinerja
- c. Akuntabilitas Kinerja
- d. Penutup

1.2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA (DP2PA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

1. TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, maka DP2PA Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
4. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
5. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
6. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
8. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;

9. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
10. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
11. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
14. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
15. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
16. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
17. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. TATA ORGANISASI

a. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, yaitu :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Struktur organisasi saat ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi yang saat ini menjadi titik fokus pemerintah dalam memperbaiki kinerja aparatur pemerintah.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DP2PA KOTA SAMARINDA



4. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA DP2PA

a. Sumber Daya Manusia DP2PA

Jumlah SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebanyak 44 orang terdiri dari PNS sebanyak 31 orang, pegawai PTTB sebanyak 8 orang, pegawai PTTH sebanyak 5 orang. Komposisi SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	13 Orang	18 Orang	31 Orang
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	1 Orang	7 Orang	8 Orang
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	1 Orang	4 Orang	5 Orang
	Jumlah	15 Orang	29 Orang	44 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 1.2.

Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki		Perempuan	
			2022	2023	2022	2023
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-	-
3	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	1	1
4	Pembina	IV/a	3	3	3	3
5	Penata Tk.I	III/d	3	3	7	9
6	Penata	III/c	3	1	3	1
7	Penata Muda Tk.I	III/b	1	1	1	1
8	Penata Muda	III/a	1	1	1	1
9	Pengatur Tk.I	II/d	2	2	1	1
10	Pengatur	II/c	-	-	1	1

11	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	3	-	-
	Jumlah		20	15	18	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 1.3.

Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/ Penjenjangan Per Desember 2023

No	Pendidikan Formal	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Spati	-	-	-
2	Pim II	1 Orang	-	1 Orang
3	Pim III	2 Orang	3 Orang	5 Orang
4	Pim IV	4 Orang	4 Orang	8 Orang
	Jumlah	7 Orang	7 Orang	14 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 1.4.

Klasifikasi PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2023

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan
1	S3	Orang	1	-
2	S2	Orang	4	7
3	S1	Orang	5	8
4	D3	Orang	1	-
5	SLTA	Orang	2	3
6	SLTP	Orang	-	-
	Jumlah		13	18

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

b. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana, inventaris kantor, kendaraan Dinas dan fasilitas lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Sarana Prasarana Aparatur Per Desember 2023

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
1	Air Condition / AC	21	Unit	B	-	21 Unit
2	Almari Besi	16	Unit	B	-	16 Unit
3	Almari Kaca / Arsip	26	Unit	B	-	26 Unit
4	Alat Pemadam	3	Unit	B	-	3 Unit
5	Brankas	1	Unit	B	-	1 Unit
6	Webcam	1	Unit	B	-	1 Unit
7	Calculator	7	Unit	B	-	7 Unit
8	Dispenser Berdiri	5	Unit	B	-	5 Unit
9	Filling Kabinet	8	Unit	B	-	8 Unit
10	Hard Disk	6	Unit	B	-	6 Unit
11	Komputer PC	32	Unit	B	-	32 Unit
12	Kend roda dua	7	Unit	B	-	7 Unit
13	Kend roda empat	8	Unit	B	-	8 Unit
14	Kipas angin	10	Unit	B	-	10 Unit
15	Kursi tamu / sofa	6	Unit	B	-	6 Unit
16	Kursi Eselon II	1	Unit	B	-	1 Unit
17	Kursi Eselon III	5	Unit	B	-	5 Unit
18	Kursi staf	45	Unit	B	-	45 Unit
19	Kursi Kerja	9	Unit	B	-	9 Unit
20	Lemari pendingin	2	Unit	B	-	2 Unit
21	Layar LCD	1	Unit	B	-	1 Unit
22	LCD Proyektor	1	Unit	B	-	1 Unit
23	Laptop	17	Unit	B	-	17 Unit
24	Meja Biro	4	Unit	B	-	4 Unit
25	Meja ½ biro	23	Unit	B	-	23 Unit
26	Meja Komputer	6	Unit	B	-	6 Unit
27	Mesin tik manual	2	Unit	B	-	2 Unit
28	Mesin absensi	2	Unit	B	-	2 Unit
29	Meja makan	2	Unit	B	-	2 Unit

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
30	Note book	3	Unit	B	-	3 Unit
31	Printer	40	Unit	B	-	40 Unit
32	Scanner	3	Unit	B	-	3 Unit
33	Televisi	6	Unit	B	-	6 Unit
34	Tangga Alumunium	2	Unit	B	-	2 Unit
35	UPS	9	Unit	B	-	9 Unit
36	White Board	2	Unit	B	-	2 Unit
37	Wireless	4	Unit	B	-	4 Unit
38	Stand Micropon	1	Unit	B	-	1 Unit
39	Micropon	2	Unit	B	-	2 Unit
40	Power Mixer	1	Unit	B	-	1 Unit
41	Bak air tandon	2	Unit	B	-	2 Unit
42	Meja Rapat	2	Unit	B	-	2 Unit
43	Kursi Tunggu	3	Unit	B	-	3 Unit
44	Kursi Indiana	2	Unit	B	-	2 Unit
45	Kasur Chelsea	3	Unit	B	-	3 Unit
46	Bed Baby Box	2	Unit	B	-	2 Unit
47	Kursi Plastik	20	Unit	B	-	20 Unit
48	Teralis Jendela	26	Unit	B	-	26 Unit
49	Teralis Pintu	5	Unit	B	-	5 Unit
50	Mesin Cuci	1	Unit	B	-	1 Unit
51	Kompore Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
52	Magic Com	1	Unit	B	-	1 Unit
53	Lemari kaca dapur	5	Unit	B	-	5 Unit
54	Lemari loker	1	Unit	B	-	1 Unit
55	Meja kerja elastis	10	Unit	B	-	10 Unit
56	Wastafel	2	Unit	B	-	2 Unit
57	Genset	1	Unit	B	-	1 Unit
58	Kursi dorong kedokteran	1	Unit	B	-	1 Unit
59	Kursi hadap	4	Unit	B	-	4 Unit

No	Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi Aset		Ket
				Baik	Rusak	
60	Kursi rapat	8	Unit	B	-	8 Unit
61	Pompa air	1	Unit	B	-	1 Unit
62	Rak besi	3	Unit	B	-	3 Unit
63	Modem orbit	1	Unit	B	-	1 Unit
64	Lemari piring	1	Unit	B	-	1 Unit
65	Peralatan permainan plastik	1	Unit	B	-	1 Unit
66	Tabung Gas	2	Unit	B	-	2 Unit
67	Gordyn	32	Unit	B	-	32 Unit

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sarana dan prasarana berupa aset guna mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih cukup memadai dan mendukung meskipun ada beberapa barang aset yang rusak (dalam usulan/proses penghapusan)

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan serta permasalahan dan isu strategis, kebijakan pembangunan mendatang harus berdasarkan visi misi dan agenda prioritas kepala daerah terpilih. Visi Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2021 – 2026)

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN “

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2021 – 2026)

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Misi merupakan arahan umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

- a. Misi 1 :Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Religius, Unggul dan Berbudaya
- b. Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan.
- c. Misi 3 :Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi.
- d. Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Mantap dan Modern.

e. Misi 5 :Mewujudkan Lingkungan Kota Yang Aman, Nyaman , Harmoni dan Lestari.

Berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota tahun 2021 – 2026, maka kapasitas riil keuangan daerah di alokasikan ke berbagai program sesuai urutan unggulan sebagai berikut :

Program Unggulan :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per Tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan *system drainase* modern.
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (*Subway dan Skytrain/Monorail*).
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan).
5. Program *Smart City Plus*.
6. Program “*Dokter On Call*” untuk kondisi darurat, lansia dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 *Playground*.
10. Program penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up).

Adapun yang menjadi fokus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah misi ke-1 dan misi ke-3 yang menjadi tugas dan tanggungjawab DP2PA dalam pencapaian misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran DP2PA Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;

2. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2023

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG	100%
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan	100%
3. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan jumlah kasus	100%
4. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	IKM	79

Anggaran program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 500.000.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 508.320.000
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 130.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 75.000.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 573.073.000
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 85.000.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 7.223.006.179
	Jumlah Anggaran	Rp. 9.194.399.179

2.3. PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DP2PA Kota Samarinda Tahun 2023 yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Belanja pada DP2PA (Pagu APBD-P) Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Belanja operasional	Rp. 8.893.975.368
	1. Belanja pegawai	Rp. 4.859.543.635
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.034.431.733
2	Belanja modal	Rp. 390.900.000
	1. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 390.900.000
	2. Belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 0
	TOTAL	Rp. 9.284.875.368

Tabel 2.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Pagu APBD P) Tahun 2023

NO	PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 30.000.000
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 13.850.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.707.716.135
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 400.632.733
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 50.000.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.000.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 71.150.000
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 22.544.000
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 32.000.000
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 12.000.000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 170.000.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Pengadaan Mebel	Rp. 85.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 190.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 110.504.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 153.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 69.200.000
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 28.000.000
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 210.000.000
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
7	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000
	2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 274.740.000
8	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 450.000.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
8	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 225.000.000
9	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
10	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
11	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 120.000.000
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	
12	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 393.073.000
13	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000
	3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.000.000
	4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.430.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
14	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 73.035.000
15	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)	
16	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 350.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
17	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
	TOTAL	Rp. 9.284.875.368

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DP2PA Kota Samarinda 7(tujuh) program dan 17(tujuh belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Berikut disajikan tabel hasil capaian kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
	1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 PD	40 PD

Pada Sasaran 1, sesuai rincian diatas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000, . Terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau prosentase keuangan sebesar 96%. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dari Triwulan I sampai Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Rapat persiapan Program pada tanggal 7 Maret 2023;
2. Rapat Persiapan dan uji coba Inovasi GESiT pada kegiatan internal

DP2PA tanggal 8 Maret 2023;

3. Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Tim Driver PUG Samarida tanggal 13 Maret 2023;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi POKJA PUG dan tim driver;
5. Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan, Honorarium PPTK Kegiatan dan cetak leaflet kegiatan;
6. Rapat koordinasi persiapan Evaluasi PUG.

Untuk Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, dengan pagu anggaran Rp.274.740.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 273.246.466,- atau prosentase keuangan sebesar 99,46%. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Kegiatan Pendampingan PUG/PPRG dimulai dengan persiapan internal yaitu ketersediaan sumber daya berupa Alat Tulis Kantor;
2. Guna memudahkan proses pendampingan PUG/PPRG maka dilakukan cetak leaflet yang berisi informasi dasar mengenai PUG dan analisis dokumen dalam PPRG;
3. Kegiatan Pendampingan PPRG (Analisis GAP) pada triwulan pertama berjalan melalui inovasi GESiT (*Gender Analysis with Simple Think*) dan dilaksanakan bagi seluruh anggota POKJA PUG yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Maret 2023 harus bergeser karena padatnya agenda anggota POKJA PUG sehingga dapat direalisasikan pada tanggal 4 April 2023;
4. Cetak Leaflet sebagai Pendukung kegiatan Advokasi PPRG bagi seluruh anggota Pokja;
5. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PUG di Jakarta dan Bandung;
6. Belanja Container Box;
7. Roadshow Pendampingan PUG di 10 Kecamatan, 59 Kelurahan;
8. Belanja Bahan Cetak Buku Panduan PUG Kelurahan;
9. Belanja Jasa Iklan PUG dan kegiatan "Monday Talkshow" Selama 5 Minggu;
10. Belanja Bahan Cetak Buku Panduan Monev PUG;
11. Belanja Honorarium PPTK dan ATK;
12. Rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 Tahun 2023 , Pemilihan Gender Champion dan Perempuan Berjasa - Seminar "SUSUKI PENTING" , Seminar Safety Riding bagi Perempuan , Seminar Puncak PHI-95 , Tabur Bunga Rangkaian PHI-95.

Tabel 3.1

Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	70 orang	40 PD	40 PD	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut :
Capaian indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2023 sebanyak 3 dokumen tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 indikator semula jumlah peserta pelatihan PPRG 70 orang dan terealisasi 70 orang, sedangkan untuk tahun 2023 karena adanya perubahan nomenklatur sub kegiatan maka indikatornya menjadi jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 40 PD dapat terealisasi 40 PD atau prosentase 100%.

Adapun masalah atau kendala yang di hadapi :

1. Pemahaman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum merata;
2. Proses E-Purchasing memakan waktu;
3. Benturan jadwal kegiatan lain;

Sasaran 2 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
	2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	25 Organisasi

Pada sasaran 2 Untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu anggaran Rp. 450.000.000,,-. Terealisasi sebesar Rp. 445.100.798,- atau prosentase keuangan sebesar 98,91 %, hasil kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Kebutuhan ATK Kegiatan;
2. Rapat Koordinasi melibatkan jejaring (DWP Kota Samarinda);
3. Belanja makan dan minum kegiatan Pemberdayaan Perempuan;

Tabel 3.2

Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	25 organisasi	25 organisasi	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut :
Capaian indikator kinerja jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan pasrtisipasi perempuan

di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota tahun 2023 adalah 25 organisasi, realisasi 25 organisasi tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2022 tidak terbiayai sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Sasaran 3 : Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Program Perlindungan Perempuan			
	1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 orang	78 Orang
	2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan	700 orang	700 orang

Pada sasaran 3, sesuai rincian diatas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 225.000.000,- . Terealisasi sebesar Rp. 220.106.180,- atau prosentase keuangan sebesar 98,18%. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Cetak (Alat Tulis Kantor)
2. Belanja Bahan Cetak (Fotocopy)
3. Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap Cleaning Service Kantor UPTD PPA, Honor Penjaga Malam Klien UPTD PPA untuk 2 Orang, Honor Pegawai Tidak Tetap Sopir, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyedia Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 149.914.200,- atau prosentase keuangan sebesar 99,94 %. Hasil Kegiatan yang dapat di laksanakan dari Triwulan I sampai Dengan Triwulan ke IV adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Bahan Cetak
3. Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi dan mediasi
4. Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap Keamanan
5. Belanja Pemeliharaan AC
6. Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Printer
7. Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan di Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Terlaksananya Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
9. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Tabel 3.3

Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	170 orang	78 orang	45,88
2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Rumah perlindungan	1 Rumah perlindungan	700 orang	700 orang	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut: Capaian indikator kinerja jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan Tahun 2023 adalah 170 orang, realisasi 78 orang dari target yang telah ditetapkan, prosentase 45,88%. Sedangkan untuk tahun 2022 indikator kinerjanya adalah Jumlah pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan target 20 sosialisasi.

Untuk capaian indikator kinerja jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 700 orang dan dapat terealisasi 700 orang , prosentase 100%. Sedangkan pada tahun 2022 targetnya 1 rumah perlindungan dan terealisasi 1 rumah perlindungan, prosentase 100%.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			
	1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen

Untuk Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp. 118.950.000,- atau prosentase keuangan sebesar 99,13%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5. Belanja Jasa Tenaga Ahli
6. Belanja Honorarium Rohaniwan
7. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Tim Pelaksana

Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Tabel 3.4

Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut: Capaian indikator kinerja jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia Tahun 2023 adalah 4 dokumen, realisasi 4 dokumen dari target yang telah ditetapkan, prosentase 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen, prosentase 100%.

Adapun masalah atau kendala yang di hadapi :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Seksi Perlindungan Khusus Anak terutama yang membidangi data.
2. Kurangnya penguasaan terhadap teknologi komputer dan interney yang menunjang kinerja.
3. Masih minimnya dukungan dan respon dari Perangkat Daerah lain terkait kelengkapan data yang responsif gender.
4. Terbatasnya anggaran dalam proses memperoleh data yang dibutuhkan.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
	1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan			
	1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	8 Lembaga
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,,-. Terealisasi sebesar Rp. 99.968.330,- atau prosentase keuangan sebesar 99,97 %. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Cetak spanduk
3. makan dan minum kegiatan sosialisasi, pembinaan
4. honorarium tenaga ahli
5. belanja jasa iklan/film dan pemotretan
6. Belanja perjalanan dinas
7. Belanja Cetak Buku Laporan

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau prosentase keuangan sebesar 100 %. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Jasa Tenaga Ahli Konsultan;
3. Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi, pembinaan;

4. Cetak spanduk;
5. Belanja peralanan dinas;
6. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, Honorarium tenaga ahli dan Honorarium Penanggungjawaban Keuangan.

Tabel 3.5
Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
2	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	100 Orang	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut capaian indikator kinerja jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan pada tahun 2023 target 8 lembaga dengan realisasi 8 lembaga, prosentase 100%. Untuk Tahun 2022 targetnya 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
	1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi
	2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen
	2. Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang	110 orang
	2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
	3. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
	4. Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen

Untuk Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp. 135.076.686,- atau prosentase keuangan sebesar 96,48%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3. Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan
4. Belanja Cetak Leaflet, Plang Ramah Anak, cetak spanduk backdrop

Masih beberapa hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, seperti belum tersedianya kendaraan operasional roda-2 yang sampai saat ini masih belum dimiliki.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana minimal perlu ditambah 2 orang lagi tenaga administrasi dan keuangan.
3. Masih kurangnya Advokasi terkait Kebijakan KLA, terutama kepada 4 (empat) pilar yaitu Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.393.073.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp.386.502.362,- atau prosentase keuangan sebesar 98,33%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Penggandaan (fotocopy a4/f4) Bahan Evaluasi KLA, Cetak Leaflet Tema KLA, Cetak Spanduk, Makan dan minum (snack) Rapat Persiapan Penginputan Data Evaluasi KLA, Makan dan minum (Nasi Kotak dan snack) Penginputan Data Evaluasi KLA;
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
3. Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 dan Kegiatan Kota Layak Anak;
4. Terlaksananya kegiatan Cetak Buku Forum Anak, Cetak Backdroo Jambore FA, Cetak Roll Banner, ATK, Cetak laporan RAD KLA, Cetak Laporan Akhir, Rakor Gugus Tugas KLA, Rakor dan Sinkronisasi SRA, Kegiatan Penyusunan RAD KLA, Perjalanan dinas dan Belanja Modal (Laptop).

masih terdapat beberapa hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, seperti belum tersedianya kendaraan operasional roda-2 yang sampai saat ini masih belum dimiliki.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana minimal perlu ditambah 2 orang lagi tenaga administrasi dan keuangan.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan beberapa OPD/Tim Gugus Tugas KLA, terutama terkait dengan permintaan data sebagai bahan Inputan Evaluasi Mandiri KLA.

Untuk Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp.49.098.060,- atau prosentase keuangan sebesar 98,20%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja alat tulis kantor, Belanja bahan cetak, Belanja makan dan minuman rapat;
2. Belanja cetak spanduk, makan dan minum kegiatan pembinaan pemenuhan hak anak;
3. Cetak leaflet, rapat kegiatan di Kecamatan Palaran, rapat kegiatan di Kecamatan Sambutan, rapat kegiatan di Kecamatan Loa Janan Ilir, rapat kegiatan di Kecamatan Sungai Kunjang (Loa Kumbar);
4. Rapat kegiatan di Kecamatan Samarinda Utara, rapat kegiatan di Kecamatan Samarinda Ilir, rapat kegiatan di Kecamatan Samarinda Kota;
5. Makan minum rapat kegiatan APSAI;
6. Cetak spanduk APSAI dan Sertifikat APSAI;
7. Tas souvenir kegiatan APSAI;
8. Cetak Laporan Akhir.

Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp.74.033.400,- atau prosentase keuangan sebesar 98,71%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Honorarium Rohaniawan;
2. Sewa Taman;
3. Belanja Sewa Sound System;
4. Belanja Perjalanan Dinas;
5. Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan;
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja cetak;
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
8. Belanja Pakaian Olahraga;
9. Pembayaran Honorarium Narasumber.

Untuk Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.65.000.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp.59.968.435,- atau prosentase keuangan sebesar 92,26%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Pengelola Keuangan;
2. Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Cetak, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Honorarium Narasumber;
3. Belanja Makan Minum Rapat, Belanja pakaian olahraga, Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Perjalanan dinas, Belanja Honorarium Rohaniawan.

Faktor hambatan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Belum semua media massa baik cetak maupun elektronik mendukung Kota Layak Anak.

Untuk Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.430.000,- telah dilaksanakan/terrealisasi sebesar Rp.74.870.200,- atau prosentase keuangan sebesar 96,69%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja alat tulis kantor, Belanja bahan cetak, Belanja makan dan minuman rapat;
2. Belanja Modal Personal Computer, Cetak Leaflet;
3. Makan dan Minuman Kegiatan Rumah Ibadah Ramah anak (RIRA), Cetak Spanduk Kegiatan RIRA, Cetak Piagam Kegiatan RIRA, Belanja Barang Untuk Di Serahkan Pada Masyarakat (Tas Souvenir) Kegiatan RIRA, Fotocopy, Makan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Cetak Sertifikat dan spanduk Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Tas souvenir KHA, Makan dan Minuman Rapat Pembentukan Pengurus APSAI, Cetak Spanduk (2 Buah) dan Cetak laporan akhir dan laporan RBRA.

Tabel 3.6

Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DP2PA Kota Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2022		2023		Prosentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	-	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	110 orang	110 orang	100%
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55 anak	55 anak	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
6	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kali	3 kali	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut capaian indikator kinerja jumlah organisasi pemerintah , Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha pada tahun 2022 belum adanya sub kegiatan, sedangkan pada tahun 2023 target 30 organisasi dan terealisasi 30 organisasi, prosentase 100%. Capaian indikator pada tahun 2022 adalah dokumen KLA dengan target 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen, prosentase 100%, dan terjadi perubahan nomenklatur maka indikatornya menjadi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 8 dokumen dan realisasi 8 dokumen, prosentase 100%. Untuk capaian indikator kinerja jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 tidak muncul sub kegiatannya, sedangkan pada tahun 2023 dengan target 110 orang dan terealisasi 110 orang dengan prosentase 100%. Capaian indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 tidak muncul sub kegiatannya, sedangkan pada tahun 2023 dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen, prosentase 100%. Capaian indikator kinerja jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebelumnya pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Jumlah forum anak Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan target 55 anak dan terealisasi 55 anak, dengan prosentase 100%, sedangkan tahun 2023 nya karena perubahan nomenklatur maka indikator nya berubah dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, dan capaian indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target, sebelumnya pada tahun 2022 indikatornya adalah Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Pemenuhan Hak Anak targetnya 3 kali dan terealisasi 3 kali, prosentase 100%, dengan adanya perubahan nomenklatur maka pada tahun 2023 menjadi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota targetnya adalah 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, prosentase 100%.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
5	Program Perlindungan Khusus Anak			
	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen
	1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang
	2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen

Sesuai rincian diatas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 73.035.500,,- Terealisasi sebesar Rp. 71.085.801,- atau prosentase keuangan sebesar 97,33%. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak pada Tanggal 31 Mei 2023 dengan Peserta UPTD PPA Provinsi dan Kota, TRC PPA Kaltim, KPAD Kaltim, PKBI Kaltim, TKSK 10 Kecamatan, dan PSM Kelurahan
2. Rapat koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak pada Tanggal 15 Juni 2023 dengan Peserta UPTD PPA Kota Samarinda, Aktivis PATBM di 15 Kelurahan.
3. Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak di Kecamatan dan Kelurahan dengan peserta terdiri dari Unsur Puskesmas, Polsek, Danramil, Lembaga Masyarakat, Forum Anak, TP PKK Kelurahan dan Kecamatan, Babinkamtibmas, Forum RT

Faktor Hambatan untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya dukungan dan respon dari kelurahan dan lembaga kemasyarakatan atas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 99.976.000,- atau prosentase keuangan sebesar 99,98%. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan Korban;
3. Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap Keamanan;
4. Belanja makan minum Konsumsi Tim Pendampingan dan Penjangkauan;
5. Belanja Baju Outdoors (Baju Lapangan tim Pendampingan dan Penjangkauan UPTD PPA);
6. Belanja Bahan Cetak (Buku Saku Edukasi Anak);
7. Belanja Bahan Cetak (Lembar Balik Kalender);
8. Terlaksananya Kegiatan Pendampingan, Mediasi dan Penjangkauan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus korban kekerasan;
9. Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan;
10. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor UPTD PPA;
11. Konsumsi Rapat Koordinasi dan mediasi;

Faktor Hambatan untuk Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran untuk menjalankan kegiatan pendampingan kekerasan terhadap anak di Kantor UPTD PPA;

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 148.990.702,- atau prosentase keuangan sebesar 99%. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Faktor hambatan Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya dukungan dan respon dari kelurahan dan lembaga kemasyarakatan atas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Terbatasnya Anggaran sehingga target untuk Pembentukan dan Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tidak dapat terlaksana sesuai renstra.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 44.342.420,- atau prosentase keuangan sebesar 88,68% . Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen SAKIP (Renja/Renja Perubahan, Renstra, Perjanjian Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran , RKA/DPA, RKA/DPA Perubahan, IKU);
2. Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/Penggandaan;
3. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
4. Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
6. Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
7. Belanja perjalanan dinas biasa.

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 29.940.000,- atau prosentase keuangan sebesar 99,80%. Kegiatan yang dilaksanakan dari adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya 14 Laporan (Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan);
2. Belanja suku cadang alat kedokteran;
3. Belanja modal mesin hitung/mesin jumlah;
4. Belanja Alat Tulis Kantor;
5. Belanja Makanan dan minuman rapat;
6. Belanja Cetak.

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 29.940.000,- atau prosentase keuangan sebesar 99,80%. Kegiatan yang dilaksanakan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya 14 Laporan (Lakip , LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan);

2. Belanja suku cadang alat kedokteran;
3. Belanja modal mesin hitung/mesin jumlah;
4. Belanja Alat Tulis Kantor;
5. Belanja Makanan dan minuman rapat;
6. Belanja Cetak.

1.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, DP2PA telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.7

**Anggaran Belanja Tidak Langsung Perubahan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023**

NO	JENIS BELANJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai			
	1. Gaji dan Tunjangan ASN			
	a. Gaji Pokok PNS	1,701,656,988	1,686,843,000	99,13
	b. Tunjangan Keluarga PNS	153,194,532	153,116,304	99,95
	c. Tunjangan Jabatan PNS	175,890,000	175,890,000	100
	d. Tunjangan Fungsional PNS	22,166,655	7,448,000	33,60
	e. Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,355,000	31,355,000	100
	f. Tunjangan Beras PNS	90,887,100	88,424,820	97,29
	g. Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PNS	20,000,000	7,710,772	38,55
	h. Pembulatan Gaji PNS	100,000	19,879	19,88
2	Tambahan Penghasilan ASN			
	Beban kerja PNS	2,512,465,860	2,474,691,562	98,50
	JUMLAH	4,707,716,135	4,625,499,337	98,25

Tabel 3.8**Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023**

NO	JENIS BELANJA, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	BELANJA LANGSUNG			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :			
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	44,342,420	88,68
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	29,940,000	99,80
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,850,000	13,850,000	100

NO	JENIS BELANJA, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan 1 :			
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :			
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	48,000,000	96,00
	2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kegiatan 2 :	274,740,000	273,246,466	99,46
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	450,000,000	445,100,798	98,91
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan :			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	99,968,330	99,97
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000	100

NO	JENIS BELANJA, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
4	Program Perlindungan Perempuan			
	Kegiatan 1 :			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	225,000,000	220,899,000	98,18
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	350,000,000	349,990,000	100
	Kegiatan 2 :			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	149,914,200	99,94
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
	Kegiatan 1 :			
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140,000,000	135,076,686	96,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	393,073,000	386,502,362	98,33
	Kegiatan 2 :			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	49,098,060	98,20
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	74,033,400	98,71
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000	59,968,435	92,26
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77,430,000	74,870,200	96,69

NO	JENIS BELANJA, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
6	Program Perlindungan Khusus Anak			
	Kegiatan :			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73,035,500	71,085,801	97,33
	Kegiatan :			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	148,990,702	99,00
	Kegiatan :			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	100,000,000	99,976,000	99,98
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			
	Kegiatan :			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	120,000,000	118,950,000	99,13
	Jumlah Belanja Langsung	2,967,128,500	2,923,802,860	98,53

Tabel 3.9

Anggaran Belanja Langsung (Rutin) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400,632,733	373,366,819	93,19
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	100
	Kegiatan :			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,150,000	70,991,435	96,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,544,000	22,544,000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,000,000	32,000,000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	12,000,000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	169,894,474	99,94
	Kegiatan :			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	Pengadaan Mebel	85,000,000	84,850,000	99,82
	Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190,000,000	89,191,600	46,94
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,504,000	109,200,000	98,82
	Kegiatan :			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153,000,000	152,083,860	94,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69,200,000	66,108,672	95,53
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,000,000	28,000,000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210,000,000	209,935,500	100
	Jumlah Belanja Langsung	1,610,030,733	1,476,166,360	91,68

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2023 **Rp.9.284.875.368,-** (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah **Rp. 4.707.716.135,-** (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Langsung Kegiatan sejumlah **Rp. 2.967.128.500,-** (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Belanja Langsung (rutin) sejumlah **Rp. 1.610.030.733,-** (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.

1.4 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023

Tabel 3.10
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2023

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA						
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,850,000				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	100.00	44,342,420	88.68	5,657,580
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,065,000	100.00	2,065,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	170,000	100.00	170,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	6,477,500	100.00	6,477,500	100.00	
	Belanja Cetak	10,650,000	100.00	10,650,000	100.00	
	Belanja Cetak Penggandaan	7,008,500	100.00	7,008,500	100.00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000	100.00	5,760,000	100.00	
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,650,000	100.00	0	0.00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	11,394,000	100.00	11,386,420	100.00	
	Belanja modal peralatan personal komputer	825,000	100.00	825,000	100.00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	100.00	29,940,000	99.80	60,000
	Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran	690,000	100.00	690,000	100.00	
	Belanja ATK	15,667,000	100.00	15,607,000	99.62	
	Belanja Cetak	3,153,000	100.00	3,153,000	100.00	
	Belanja Cetak Penggandaan	1,500,000	100.00	1,500,000	100.00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	8,640,000	100.00	8,640,000	100.00	
	Belanja modal mesin hitung/mesin jumlah	350,000	100.00	350,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,850,000	100.00	13,850,000	100.00	-
	Belanja ATK	5,820,000	100.00	5,820,000	100.00	
	Belanja Cetak	1,770,000	100.00	1,770,000	100.00	
	Belanja Cetak Penggandaan	500,000	100.00	500,000	100.00	
	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000	100.00	5,760,000	100.00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,158,348,868				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,707,716,135	100.00	4,625,499,337	98.25	82,216,798
	Belanja Gaji Pokok PNS	1,701,656,988.00	100.00	1,686,843,000	99.13	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	153,194,532.00	100.00	153,116,304	99.95	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175,890,000.00	100.00	175,890,000	100.00	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22,166,655.00	100.00	7,448,000	33.60	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,355,000.00	100.00	31,355,000	100.00	
	Belanja Tunjangan Beras	90,887,100.00	100.00	88,424,820	97.29	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20,000,000.00	100.00	7,710,772	38.55	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100,000.00	100.00	19,879	19.88	
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,512,465,860.00	100.00	2,474,691,562	52.57	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400,632,733	100.00	373,366,819	93.19	27,265,914
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	363,975,000	100.00	354,475,000	97.39	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	33,761,200	100.00	16,518,855	48.93	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1,287,348	100.00	1,054,680	81.93	
	Belanja Iuran Kematian Bagi Non ASN	1,609,185	100.00	1,318,284	81.92	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	-
	Belanja honorarium Penanggungjawaban Keuangan	2,325,000	100.00	2325000	100.00	
	Belanja alat/bahan untuk keg kantor - ATK	22,415,000	100.00	22,415,000	100.00	
	Belanja alat/bahan untuk keg kantor - bahan cetak	9,800,000	100.00	9800000	100.00	
	Belanja alat/bahan untuk keg kantor - bahan untuk keg kantor lainnya	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	
	Belanja makan dan minum rapat	12,960,000	100.00	12,960,000	100.00	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313,694,000				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	-
	Belanja Alat/bahan Untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,150,000	100.00	70,991,435	96.51	158,565
	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	2,325,000	100.00	2,325,000	100.00	
	Belanja Modal Gorden	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	
	Belanja Modal Acrylic	75,000	100.00	0	0.00	
	Belanja Modal Mesin penghancur kertas	5,000,000	100.00	4,999,440	99.99	
	Belanja modal AC	10,000,000	100.00	9,990,000	99.90	
	Belanja modal Personal computer	14,600,000	100.00	14,568,750	99.79	
	Belanja modal mesin scanner	8,000,000	100.00	7,960,365	99.50	
	Belanja modal printer	16,150,000	100.00	16,147,880	99.99	
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,544,000	100.00	22,544,000	100.00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,544,000	100.00	22,544,000	100.00	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,000,000	95.50	32,000,000	100.00	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	8,000,000	100.00	8,000,000	100.00	
	Belanja Cetak	16,002,500	91.00	16,002,500	100.00	
	Belanja Penggandaan	7,997,500	100.00	7997500	100.00	
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	100.00	12,000,000	100.00	-
	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000	100.00	12,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/ Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	91.00	169,894,474	99.94	105,526
	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	7,480,000	100.00	7,480,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162,520,000	100.00	162,414,474	100.00	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,000,000				
1.4.1	Pengadaan Mebel	85,000,000	100.00	84,850,000	99.82	150,000
	Belanja modal kursi pejabat	25,000,000	100.00	24,850,000	99.40	
	Belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	
	Belanja modal kursi ruang tunggu	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	
	Belanja modal alat kantor lainnya	11,500,000	100.00	11,500,000	100.00	
	Belanja modal meja kerja pejabat	36,000,000	100.00	36,000,000	100.00	
	Belanja modal lemari dan arsip pejabat	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,504,000				
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190,000,000	100.00	89,191,600	46.94	100,808,400
	Kegiatan Kantor-Alat Listrik	300,000	100.00	300,000	100.00	
	Belanja Tagihan Telpon	20,000,000	100.00	11,999,600	60.00	
	Belanja Tagihan Air	24,000,000	100.00	12,110,000	50.46	
	Belanja Tagihan Listrik	145,700,000	100.00	64,782,000	44.46	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,504,000	100.00	109,200,000	98.82	1,304,000
	Honorarium Pengelola Keuangan Spesifikasi Pengurus Barang	9,000,000.00	100.00	9,000,000.00	100.00	
	Honorarium Tim	13,200,000.00	100.00	13,200,000.00	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13,800,000	100.00	13,800,000	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	74,504,000	100.00	73,200,000	98.25	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460,200,000				
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153,000,000	100.00	152,083,860	94.51	916,140
	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	7,480,000	100.00	7,480,000	100.00	
	Belanja BBM/Gas dan Pelumas	85,624,000	100.00	85,624,000	100.00	
	Belanja suku Cadang Alat Angkutan	31,200,000	100.00	31,200,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk keg kantor alat listrik	12,000	100.00	0	0.00	
	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	8,684,000	100.00	7,779,860	89.59	
	Belanja pemeliharaan dan kendaraan dinas	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69,200,000	100.00	66,108,672	95.53	3,091,328
	Belanja BBM/gas dan Pelumas	26,100,000	100.00	26,100,000	100.00	
	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	26,300,000	100.00	26,300,000	100.00	
	Belanja Alat Listrik	116,000	100.00	116000	100.00	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,684,000	100.00	5,592,672	64.40	
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	8,000,000	100.00	8,000,000	100.00	
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,000,000	100.00	28,000,000	100.00	-
	Belanja pemeliharaan Alat pendingin (AC)	18,000,000	100.00	18,000,000	100.00	
	Belanja pemeliharaan komputer	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210,000,000	99.98	209,935,500	99.97	64,500
	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	7,220,000	100.00	7,220,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	
	Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi	162,439,500	100.00	162,422,000	99.99	
	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	19,500,000	100.00	19,500,000	100.00	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	17,293,500	100.00	17,293,500	100.00	
	Alat Tulis	2,500	0.00	0	0.00	
	Alat bahan listrik	44,500	0.00	0	0.00	
	Belanja alat untuk kegiatan kantor	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	324,740,000				
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	96.00	48,000,000	96.00	2,000,000
	Honorarium PA	520,000	100.00	520,000.00	100.00	
	Honorarium PPTK	505,000	100.00	505,000.00	100.00	
	Honorarium Pejabat penatausahaan keuangan	400,000	100.00	400,000.00	100.00	
	Honorarium Bendahara pengeluaran	340,000	100.00	340,000.00	100.00	
	Honorarium Pembantu bendahara pengeluaran	300,000	100.00	300,000.00	100.00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,225,500	100.00	7,225,500	100.00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,949,500	100.00	2,949,500	0.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,360,000	100.00	27,360,000	100.00	
	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara	7,000,000	82.86	5,800,000	82.86	
	Belanja Jasa Tenaga kebersihan	1,600,000	50.00	800,000	50.00	
	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	274,740,000	99.46	273,246,466	99.46	1,493,534
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	2,500,000	100.00	2,500,000	100.00	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2,420,000	100.00	2,420,000	100.00	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	960,000	100.00	960,000	100.00	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	840,000	100.00	840,000	100.00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	760,000	100.00	760,000	100.00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1,020,000	100.00	1,020,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,127,500	100.00	5,127,500	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	23,352,500	100.00	23,352,500	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor	1,155,000	100.00	1,155,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-souvenir/cendra mata	16,800,000	100.00	16,800,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-lainnya	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53,400,000	100.00	53,400,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,000,000	91.00	9,100,000	91.00	
	Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	21,400,000	100.00	21,400,000	100.00	
	Honorarium Rohaniawan	800,000	100.00	800,000	100.00	
	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300,000	0.00	0	0.00	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	10,500,000	100.00	10,500,000	100.00	
	Belanja sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Konsultasi ke Kementerian PPPA	50,165,000	99.41	49,871,466	99.41	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	36,240,000	100.00	36,240,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/ Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	450,000,000				
2.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	450,000,000	99.12	445,100,798	98.91	4,899,202
	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	4,350,000	100.00	4,350,000	100.00	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	4,230,000	100.00	4,230,000	100.00	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	2,280,000	100.00	2,280,000	100.00	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	2,760,000	100.00	2,760,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,610,000	100.00	14,608,900	99.99	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,905,000	69.51	4,800,000	69.51	
	Belanja diserahkan kepada masyarakat	75,000,000	98.73	74,050,000	98.73	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	154,080,000	100.00	154,080,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22,400,000	93.75	21,000,000	93.75	
	Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	12,700,000	100.00	12,700,000	100.00	
	Honorarium rohaniawan	2,800,000	100.00	2,800,000	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga kebersihan	450,000	100.00	450,000	100.00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	5,400,000	100.00	5,400,000	100.00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	90,895,000	99.51	90,451,898	99.51	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	49,140,000	100.00	49,140,000	100.00	
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	225,000,000				
3.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	225,000,000				
3.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	225,000,000	98.18	220,106,180	98.18	4,893,820
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	8,812,500	100.00	8,812,500	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	2,047,500	97.51	1,996,500	97.51	
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	4,970,000	100.00	4,970,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	74,880,000	100.00	74,880,000	100.00	
	Belanja honorarium, narasumber atau pembahas moderator, pembawa acara dan panitia	27,900,000	85.48	23,850,000	85.48	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	41,000,000	100.00	41,000,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,390,000	100.00	43,597,180	98.21	
	Belanja modal baju pengaman	21,000,000	100.00	21,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/ Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000				
3.2.1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	99.94	149,914,200	99.94	85,800
	Honorarium Pengguna Anggaran	1,040,000	100.00	1,040,000.00	100.00	
	Honorarium PPTK	1,010,000	100.00	1,010,000.00	100.00	
	Honorarium PPK SKPD	400,000	100.00	400,000.00	100.00	
	Honorarium Bendahara pengeluaran	680,000	100.00	680,000.00	100.00	
	Honorarium Pembantu bendahara pengeluaran	600,000	100.00	600,000.00	100.00	
	Belanja Alat-Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,714,000	99.97	2,713,200	99.97	
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	842,000	100.00	842,000	100.00	
	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	87,000,000	100.00	86,996,000	100.00	
	Konsumsi rapat koordinasi	10,800,000	100.00	10,800,000	100.00	
	Konsumsi rapat mediasi	14,112,000	99.49	14,040,000	99.49	
	Honor pegawai tidak tetap keamanan	24,000,000	100.00	24,000,000	100.00	
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,732,000	99.48	1,723,000	99.48	
	Pemeliharaan AC	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	
	Beban pemeliharaan peralatan komputer printer	2,070,000	100.00	2,070,000	100.00	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	130,000,000				
4.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	130,000,000				
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100.00	99,968,330	99.97	31,670
	Honorarium Pengguna Anggaran	1,040,000	100.00	1,040,000	100.00	
	Honorarium PPTK	1,010,000	100.00	1,010,000	100.00	
	Honorarium PPK SKPD	400,000	100.00	400,000	100.00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	340,000	100.00	340,000	100.00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	900,000	100.00	900,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	5,572,000	100.00	5,572,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1,750,000	100.00	1,750,000	100.00	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	43,200,000	100.00	43,200,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia	7,000,000	100.00	7,000,000	100.00	
	Honorarium tenaga ahli konsultan	25,428,000	100.00	25,427,746	100.00	
	Belanja jasa iklan/reklame/film	900,000	100.00	900,000	100.00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	12,460,000	100.00	12,428,584	99.75	
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	-
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	558,000	100.00	558,000	100.00	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,080,000	100.00	1,080,000	100.00	
	Honorarium tenaga ahli	28,362,000	100.00	28,362,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	120,000,000				
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000				
5.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	120,000,000	100.00	118,950,000	99.13	1,050,000
	Belanja honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	3,930,000	100.00	3,930,000	100	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	340,000	100.00	340,000	100	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,707,500	100.00	4,707,500	100	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9,619,500	100.00	9,569,500	99.48	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,880,000	100.00	11,880,000	100.00	
	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara	10,600,000	100.00	9,600,000	90.57	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	29,800,000	100.00	29,800,000	100.00	
	Honorarium Rohaniawan	800,000	100.00	800,000	100.00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36,461,000	100.00	36,461,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,862,000	100.00	11,862,000	100.00	
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	725,503,000				
6.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	533,073,000				
6.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140,000,000	100.00	135,076,686	96.48	4,923,314
	Belanja honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	6,750,000	100.00	6,750,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000	100.00	680,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4,214,000	100.00	4,214,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,869,000	100.00	6,869,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,040,000	100.00	2,040,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,300,000	100.00	9,800,000	73.68	
	Honorarium Rohaniawan	800,000	100.00	800,000	100.00	
	Belanja jasa tenaga ahli	30,318,000	100.00	30,318,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,699,000	100.00	22,405,686	98.71	
	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	12,330,000	100.00	12,000,000	97.32	
	Belanja Modal Tanda penghargaan bidang lainnya	40,000,000	100.00	39,200,000	98.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	393,073,000	100.00	382,022,362	98.33	11,050,638
	Belanja honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16,610,000	100.00	16,610,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,530,000	0.00	0	0.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,874,700	100.00	3,874,700	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19,750,800	85.06	16,800,800	85.06	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan untuk keg kantor lainnya	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88,920,000	100.00	88,920,000	100.00	
	Belanja Pakaian olahraga	29,200,000	100.00	29,054,000	99.50	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,200,000	100.00	14,350,000	74.74	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	37,200,000	100.00	37,200,000	100.00	
	Honorarium Rohaniawan	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	
	Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	
	Belanja Sewa Mebel	1,312,500	100.00	1,312,500	100.00	
	Belanja sewa alat pendingin	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	
	Belanja Sewa alat rumah tangga lainnya (home use)	800,000	100.00	800,000	100.00	
	Belanja Sewa bangunan gedung kantor	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	
	Belanja perjalanan dinas biasa	73,185,000	100.00	73,150,362	99.95	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	16,440,000	100.00	15,000,000	91.24	
	Belanja modal alat kantor lainnya	4,500,000	100.00	4,500,000	100.00	
	Belanja modal Personal computer	19,550,000	100.00	19,450,000	99.49	
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	192,430,000				
6.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	100.00	49,098,060	98.20	901,940
	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	2,305,000	100.00	2,305,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,654,000	100.00	2,653,100	99.97	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,261,000	100.00	8,261,000	100.00	
	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	600,000	100.00	600,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,520,000	100.00	23,520,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,900,000	100.00	2,000,000	68.97	
	Honorarium Rohaniawan	400,000	100.00	400,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,360,000	99.99	9,358,960	99.99	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	98.71	74,033,400	98.71	966,600
	Belanja honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	2,065,000	100.00	2,065,000.00	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	340,000	100.00	340,000.00	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	965,000	100.00	965,000.00	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,424,000	100.00	2,424,000.00	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,400,000	100.00	14,400,000.00	100.00	
	Belanja Pakaian olahraga	22,500,000	100.00	22,500,000.00	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5,800,000	83.62	4,850,000.00	83.62	
	Honorarium Rohaniawan	400,000	100.00	400,000.00	100.00	
	Sewa Taman	10,000,000	100.00	10,000,000.00	100.00	
	Sewa Sound System	1,000,000	100.00	1,000,000.00	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,106,000	99.89	15,089,400.00	99.89	
6.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65,000,000	92.26	59,968,435	92.26	5,031,565
	Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	2,065,000	100.00	2,065,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,621,000	100.00	3,621,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,028,000	100.00	8,028,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,760,000	98.87	17,560,000	98.87	
	Belanja pakaian olahraga	7,800,000	100.00	7,800,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,400,000	61.34	6,992,625	61.34	
	Honorarium Rohaniawan	800,000	50.00	400,000	50.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,526,000	99.82	13,501,810	99.82	
6.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77,430,000	100.00	74,870,200	96.69	2,559,800
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,590,000	100.00	3,590,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000	100.00	680,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,387,500	100.00	3,383,500	99.88	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,276,500	100.00	9,275,900	99.99	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,200,000	100.00	1,200,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,360,000	100.00	15,360,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,100,000	100.00	10,700,000	81.68	
	Honorarium Rohaniawan	800,000	100.00	800,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,036,000	100.00	15,030,800	99.97	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15,000,000	100.00	14,850,000	99.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	223,035,500				
7.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	73,035,500				
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73,035,500	100.00	71,085,801	97.33	1,949,699
	Belanja honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	1,965,000	100.00	1,965,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,095,500	100.00	12,095,500	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,462,000	100.00	4,462,000	100.00	
	Belanja Makanan dan minuman rapat	14,400,000	100.00	14,400,000	100.00	
	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	9,000,000	100.00	7,200,000	80.00	
	Tranfortasi Air	1,500,000	100.00	1,500,000	100.00	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,663,000	100.00	10,513,301	98.60	
	Transport peserta sosialisasi PKA	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	
	Roll Up Banner	3,950,000	100.00	3,950,000	100.00	
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000				
7.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	100.00	148,990,702	99.00	1,009,298
	Belanja honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan	7,480,000	100.00	7,480,000	100.00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	850,000	100.00	850,000	100.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,967,000	100.00	7,967,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	2,853,000	100.00	2,853,000	100.00	
	Belanja Makanan dan minuman rapat	1,080,000	100.00	1,080,000	100.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19,600,000	100.00	18,600,000	94.90	
	Honorarium Rohaniawan	400,000	100.00	400,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,590,000	100.00	19,580,702	99.95	
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	16,800,000	100.00	16,800,000	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	57,380,000	100.00	57,380,000	100.00	
	Belanja modal baju pengaman	16,000,000	100.00	16,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	450,000,000				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	350,000,000				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	350,000,000				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	350,000,000	100.00	349,990,000	100.00	10,000
	Honorarium Pengguna Anggaran	3,750,000	100.00	3,750,000.00	100.00	
	Honorarium PPTK	3,630,000	100.00	3,630,000.00	100.00	
	Honorarium PPK SKPD	2,880,000	100.00	2,880,000.00	100.00	
	Honorarium Bendahara pengeluaran	2,520,000	100.00	2,520,000.00	100.00	
	Honorarium Pembantu bendahara pengeluaran	2,280,000	100.00	2,280,000.00	100.00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1,360,000	100.00	1,360,000.00	100.00	
	Alat Tulis Kantor	2,644,500	100.00	2,644,500	100.00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak (ATK)	4,950,000	100.00	4,950,000	100.00	
	Cetak laporan	750,000	100.00	750,000.00	100.00	
	Cetak leaflet	3,600,000	100.00	3,600,000	25.00	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Fotocopy	1,019,000	100.00	1,019,000	100.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,032,000	100.00	4,032,000	100.00	
	Honorarium tim pendampingan psikolog	67,482,000	100.00	67,482,000	100.00	
	Honorarium Tim Penegak dan Bantuan Hukum	22,494,000	100.00	22,494,000	100.00	
	Honor pegawai tidak tetap Cleaning service	24,000,000	100.00	24,000,000	100.00	
	Penjaga malam klien UPTD PPA	34,800,000	100.00	34,800,000	100.00	
	Penjaga malam rumah perlindungan UPTD PPA	17,400,000	100.00	17,400,000	100.00	
	Honor pegawai tidak tetap sopir	24,000,000	100.00	24,000,000	100.00	
	Roll Up Banner Tema Stop Bullying	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	
	Roll Up Banner Tema Stop KDRT	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	
	Roll Up Banner Tema Stop Kekerasan Pada Perempuan	1,800,000	100.00	1,800,000	100.00	
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5,108,500	99.80	5,098,500	99.80	
	Papan Nama Ruangan	1,500,000	100.00	1,500,000	100.00	
	Pembuatan Baliho Layanan UPTD PPA Kota Samarinda	3,400,000	100.00	3,400,000	100.00	
	Plang informasi kantor UPTD PPA	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC) untuk Kantor UPTD PPA	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	
	Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas) Ruang Laktasi/Menyusui untuk Penyimpanan ASI	4,500,000	100.00	4,500,000	100.00	
	Pengisap Debu Listrik/ Vacuum Cleaner Kantor UPTD PPA	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00	
	Belanja Modal CCTV Kantor Pelayanan UPTD PPA dan Rumah Perlindungan Humanis (Rumanis)	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	
	Speaker Aktif untuk Pelayanan Mediasi	4,500,000	100.00	4,500,000	100.00	
	Belanja Modal Komputer/ Laptop untuk Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPA	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	
	Belanja Modal Printer kantor Pelayanan UPTD PPA	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	
	Belanja Modal Scanner kantor Pelayanan UPTD PPA	8,000,000	100.00	8,000,000	100.00	

No.	Program Dan Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Ket/Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100,000,000				
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	99.98	99,976,000	99.98	24,000
	Honorarium PPTK	505,000	100.00	505,000	100.00	
	Honorarium PPK SKPD	400,000	100.00	400,000	100.00	
	Honorarium Pengguna anggaran	520,000	100.00	520,000	100.00	
	Honorarium Bendahara pengeluaran	340,000	100.00	340,000	100.00	
	Honorarium Pembantu bendahara pengeluaran	300,000	100.00	300,000	100.00	
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	100.00	680,000	100.00	
	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,864,000	100.00	3,864,000	100.00	
	Belanja Cetak	1,950,000	100.00	1,950,000	100.00	
	Cetak Buku saku edukasi anak	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	
	Cetak lembar balik	12,250,000	100.00	12,250,000	100.00	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor UPTD PPA	4,351,000	100.00	4,351,000	100.00	
	Konsumsi tim pendampingan dan penjangkauan korban	17,280,000	100.00	17,280,000	100.00	
	Konsumsi rapat koordinasi	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	
	Konsumsi rapat mediasi	11,760,000	99.80	11,736,000	99.80	
	Baju outdoors	6,800,000	100.00	6,800,000	100.00	
	Honor pegawai tidak tetap keamanan	24,000,000	100.00	24,000,000	100.00	
	TOTAL	9,284,875,368	98,85	9,020,195,737	97,15	264,679,631

Dari pelaksanaan anggaran yang di selenggarakan oleh DP2PA Kota Samarinda selama Tahun 2023 guna mencapai target IKU terdapat efisiensi terhadap pemakaian dana sebesar Rp. 264.679.631 (Dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), 2,85 % dari total anggaran Tahun 2023.

1.5 INOVASI

- **PENASARAN (Percepatan Penurunan Perkawinan Usia Anak Berbasis Komunitas)**

Merupakan suatu program peningkatan peran PUSPAGA dalam pengasuhan keluarga berbasis komunitas dengan pendekatan langsung ke masyarakat unit terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT), lembaga masyarakat dan komunitas. Program tersebut dilakukan dengan cara ngobras (ngobrol santai), curhat, diskusi, atau berbagi cerita. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Puspaga outdoor yaitu tim konselor dan kader jemput bola ke masyarakat dengan sasaran di RT dan komunitas di Kelurahan Karang Anyar. Layanan konseling pembelajaran keluarga akan dilakukan setiap hari selasa dalam waktu 2 bulan. Layanan konseling pengasuhan keluarga sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga serta agar orang tua atau pengasuh memahami konsep pengasuhan yang baik termasuk pencegahan perkawinan usia anak sehingga dapat membentuk tim yang hebat dalam keluarga dan bagi calon pengantin dapat mempersiapkan diri menjadi orang tua yang berkompeten dalam mengasuh anak. Program ini diharapkan berdaya dan efektif dalam mencegah kasus perkawinan usia anak di masyarakat.

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Samarinda, 29 Februari 2024

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERJANJIAN KINERJA STRUKTURAL

Tahun 2023

dp2pasamarinda.com



[dp2a.kotasamarinda](https://www.instagram.com/dp2a.kotasamarinda)



Jalan Dahlia No. 1 Komplek
Balaikota, Kel. Bugis Samarinda
(75121)





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **drg. DEASY EVRIYANI, M.SI**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA.**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Dr. H. ANDI HARUN**
Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA.**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. H. ANDI HARUN

Pihak Pertama,

drg. DEASY EVRIYANI, M.SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SAMARINDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase PD yang mengimplementasikan PPRG	100%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Persentase peningkatan jumlah wirausaha perempuan	100%
3	Menurunkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan jumlah kasus	100%
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	79

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 550.000.000,-
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 508.320.000,-
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 130.000.000,-
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 75.000.000,-
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 573.073.000,-
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 85.000.000,-
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.223.006.179,-
	Jumlah Anggaran	Rp 9.194.399.179,-

Samarinda, 2 Januari 2023

Walikota Samarinda



DR. H. ANDI HARUN

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

drg. DEASY EVRIYANI, M.Si
NIP. 19750402 2003122006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Bidang PHA Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : drg. Deasy Evriyani, M.Si
Jabatan : Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

drg. Deasy Evriyani, M.Si
NIP. 197504022003122006

Pihak Pertama,

Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
NIP. 19670422 198609 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS /MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.	Jumlah Rencana Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun 2022, 2023 dan 2024 tersusun.	13 Dokumen	100	12 Bulan	
2	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.	Tercapainya koordinasi Perumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pemenuhan hak anak.	3 Dokumen	100	12 Bulan	
3	Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak sesuai 5 kluster hak anak .	5 Dokumen	100	12 Bulan	
4	Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.	Jumlah koordinasi Fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pemenuhan hak anak.	10 Dokumen	100	12 Bulan	
5	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.	Jumlah koordinasi kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak pada lembaga pemerintahan, nonpemerintah, dan dunia usaha.	3 Dokumen	100	12 Bulan	
6	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.	Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak.	3 Laporan	100	12 Bulan	
7	Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	Jumlah laporan dalam pertanggung jawaban tersusun.	1 Laporan	100	12 Bulan	
8	Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah	Jumlah pengendalian intern pemerintah.	3 Laporan	100	12 Bulan	
9	Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah pelaksanaan tugas lain.	12 Laporan	100	12 Bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax (0541) 743307, Telpun Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Agus Wulan Ariani, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Ibnu Araby, M.MPd

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 9 Juni 2023

Pihak Kedua

DR. Ibnu Araby, MM.Pd.
NIP 196707131991031013

Pihak Pertama

Erni Agus Wulan Ariani, SE
NIP.19740822200212205



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Milono No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail: dppakotasamarinda@yahoo.co.id
SAMARINDA (75121)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin Nur, SE. MM
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : drg. Deasy Evriyani, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drg. Deasy Evriyani, M.Si
NIP. 197504022003122006

Samarinda, 4 Januari 2023
Pihak Pertama

Syarifuddin Nur, SE. MM
NIP. 197411052001121009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2023

NAMA

: Syarifuddin Nur, SE. MM

NIP.

: 197411052001121009

JABATAN

: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

OPD

: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			BIAYA	KETERANGAN
			KUALITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU		
1	Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya	Jumlah RKA yang tersusun	3 KEGIATAN	100%	12 bulan	-	
2	Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan	10 DOKUMEN	100%	12 bulan	-	
3	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kelurahan di 10 Kecamatan	10 LAPORAN	100%	12 bulan	-	
4	Melaksanakan Koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	4 DOKUMEN	100%	12 bulan	-	
5	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan	Jumlah kasus kekerasan	1 DOKUMEN	100%	12 bulan	-	
6	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi	2 LAPORAN	100%	12 bulan	-	
7	Membuat laporan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan	1 LAPORAN	100%	12 bulan	-	
8	Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan	Jumlah Kegiatan	12 SURAT	100%	12 bulan	-	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan/pimpinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Tugas lainnya	12 LAPORAN	100%	12 bulan	-	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Awe Ului, SKM.,M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drg. Deasy Evriyani, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Deasy Evriyani, M.Si
NIP. 19750402 200312 2 006

Pihak Pertama,

Awe Ului, SKM., M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nama : Awe Ului, SKM, M. Kes
 NIP : 19690408 1994022002
 Jabatan : Kepala Bidang
 Bidang : Kualitas Hidup Perempuan
 OPD : Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kegiatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.	Tersusunnya RKA sesuai renstra dan Terlaksananya Rencana Kerja Bidang KHP	5 Dokumen
2	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Tersedianya bahan - bahan literatur dasar hukum, perundangan dan petunjuk teknis dan terlaksananya kebijakan bidang pelembagaan perempuan dan kualitas keluarga	12 dokumen
3	Pelaksanaan koordinasi pelembagaan pengarusstamaan gender	Terlaksana rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan OPD terkait	40 OPD
4	Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender	Terlaksananya koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender	40 OPD
5	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.	Tersedianya data gender	4 Dokumen
6	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusstamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatana kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga.	4 Dokumen
7	Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	Tersedianya laporan kegiatan dan laporan tahunan dari setiap Subkoordinator sebagai pemegang program	5 Dokumen
8	Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada subkoordinator dan staff	8 dokumen
9	Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas lain yang diberiakn oleh atasan	12 rapat

Samarinda, 3 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas,



drg. Deasy Evriyani, M. Si
 NIP: 197504022003122006

Kabid KHP



Awe Ului, SKM, M. Kes
 NIP : 19690804 1994022002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
Jalan Bhayangkara No. 4 (Komplek Polsek Samarinda Kota)
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75121

Telpon Pengaduan +62 823-2442-1313 Email: uptppa.samarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Violeta, SE
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : drg. Deasy Evriyani, M.Si
Jabatan : Plh.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. Deasy Evriyani, M.Si
Nip. 196707131991031013

Samarinda, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

Violeta, SE
Nip. 197606202007012023



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahayu Endah Nuraini, SE., M.Si
Jabatan : Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drg. Deasy Evriyani, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Deasy Evriyani, M.Si
NIP. 19750402 200312 2 006

Pihak Pertama,

Rahayu Endah Nuraini, SE., M.Si
NIP. 19670629 199903 2 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Membuat usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	Jumlah dokumen RKA dan kegiatan	1 Dokumen	100	12 bulan	
2	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Politik,	Jumlah dokumen rumusan kebijakan	1 Dokumen	100	12 bulan	
3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	100	12 bulan	
4	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan bahan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di	Jumlah Dokumen kegiatan sosialisasi dan bimtek	1 Dokumen	100	12 bulan	
5	Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga	1 Dokumen	100	12 bulan	
6	Menyusun dan menetapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen standarisasi lembaga penyedia layanan	1 Dokumen	100	12 bulan	
7	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan serta pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Politik,	Jumlah Dokumen monev dan pelaporan	1 Dokumen	100	12 bulan	
8	Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah dokumen laporan dan pertanggungjawaban	1 Dokumen	100	12 bulan	
9	Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan	Jumlah dokumen sistem pengendalian intern	1 Dokumen	100	12 bulan	
10	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan	1 Dokumen	100	12 bulan	
11	Membuat usulan Surat Keputusan Walikota tentang penunjukkan Desa PrimaTingkat Kota Samarinda	Jumlah Dokumen usulan SK Walikota	1 Dokumen	100	12 bulan	
12	Menghimpun data pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen data pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial	1 Dokumen	100	12 bulan	
13	Tugas tambahan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah Dokumen kegiatan	1 Kegiatan	100	12 bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313
Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudy Heriyanto, SKM
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan),
Subkoordinator Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Bidang PHA Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
NIP. 19670422 198609 1 001

Pihak Pertama,

Rudy Heriyanto, SKM
NIP. 19670503 199102 1 002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya	Jumlah rencana program dan kegiatan yang tersusun	6 Dokumen	100%	12 Bulan	
2	Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pemenuhan hak khusus anak di bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah terlaksananya kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan	12 Dokumen	100%	12 Bulan	
3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	12 Dokumen	100%	12 Bulan	
4	Melaksanakan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan	2 Laporan	100%	12 Bulan	
5	Memfasilitasi, sosialisasi dan bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah sosialisasi dan bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	2 Kegiatan	100%	12 Bulan	
6	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pemenuhan Hak Anak di bidang pendidikan dan kesehatan	4 Laporan	100%	12 Bulan	
7	Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang tersusun	12 Laporan	100%	12 Bulan	
8	Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan	Jumlah sistem pengendalian intern pemerintahan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
9	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah tugas lain yang diberikan atasan	12 Kegiatan	100%	12 Bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Telp/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Rini Sulistyowati
Jabatan : Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan), Subkoordinator Pengasuhan dan Lingkungan)
Bidang : Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua,

Muhammad Firman S.Sos, M.Si
NIP. 19670422 198609 1 001

Pihak Pertama,

Dra. Rini Sulistyowati
NIP. 19670121 199203 2 012



PEMERINTAHKOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Milono No. 01 Telp. (0541) 743307

Web <http://bpmp.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

SAMARINDA 75121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD IRWANSYAH, SE
Jabatan : PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WIYONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : KABID. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WIYONO, S.Sos., M.Si

Nip. 19650221 199003 1 017

AHMAD IRWANSYAH, SE

Nip. 19760829 200212 1 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023

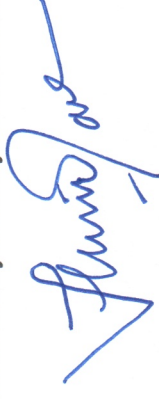
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan penyajian data dan Informasi data kekerasan terhadap anak serta layanan data gender dan anak [SIGA]	Jumlah Data Gender dan Anak dan Data Kekerasan terhadap anak	1 dokumen Data Gender dan Anak dan data kekerasan dan 1 buku laporan Kegiatan
2	Koordinasi dan kerjasama dengan LP2M UNMUL tentang Pengolahan, Penyusunan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender dan Anak [SIGA]	1 kegiatan

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak



WIYONO, S.Sos., M.Si
 Nip. 19650221 199003 1 017

Samarinda, 03 Januari 2023
 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda



AHMAD IRWANSYAH, SE
 Nip. 19760829 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Milono No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://bump.samarindakota.go.id> e-mail: dppakotasamarinda@yahoo.co.id
SAMARINDA (75121)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dardanella Yama Sartika, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sub Koordinator Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Syarifuddin Nur, SE.,MM
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

Syarifuddin Nur, SE., MM
NIP.19741105 200112 1 009

Pihak Pertama,

Dardanella Yama Sartika, S.Sos, M.Si
NIP.19851223 201001 2 009

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			BIAYA
			KUALITAS/OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	
1	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya	Jumlah rencana kegiatan sub.bid pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
2	Merumuskan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah rencana aksi tugas dan fungsi sub.bid pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ke kementerian PPPA	1 Kegiatan	100%	12 Bulan	
4	Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan terhadap perempuan	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di 5 kecamatan	5 Kegiatan	100%	12 Bulan	
5	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan serta pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kelurahan di 10 Kecamatan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
6	Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	Kelurahan di 10 Kecamatan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
7	Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan	Kelurahan di 10 Kecamatan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	
8	Melaksanakan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak serta penanganan kasus kekerasan perempuan	Kelurahan di 10 Kecamatan	1 Dokumen	100%	12 Bulan	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Try Setyawaty, S.Psi
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Firman. S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua

MUHAMMAD FIRMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 1967044221986091001

Pihak Pertama

TRY SETYAWATY, S.Psi
NIP. 1979011120100012001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yamin,S.Sos
Jabatan : Staf Pencegahan Kekerasan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syarifuddin Nur,SE.MM
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

Muhammad Yamin.S.Sos
NIP. 197711172007011007

Pihak Pertama,

Syarifuddin Nur, SE.MM
NIP. 197411052001121009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Uraian Kegiatan / Tugas	Indikator Kinerja	Target			
			Output	Mutu	Waktu	Biaya
1	Menyiapkan data rencana program & kegiatan sesuai bidang tugasnya.	Jumlah data yang menghasilkan keberanaran informasi	1 Berkas	100	12 Bulan	
2	Menyiapkan data kebijakan operasional, penyusunan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data & informasi kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah SK	2 Dokumen	100	12 Bulan	
3	Menyiapkan bahan koordinasi & sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Koordinasi	5 Laporan	100	12 Bulan	
4	Menyiapkan data fasilitas, sosialisasi & bahan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Sosialisasi	5 Kegiatan	100	12 Bulan	
5	Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi & pelaporan penerapan kebijakan serta pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Kelurahan di 10 Kecamatan	10 Dokumen	100	12 Bulan	
6	Membuat laporan & pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.	Kelurahan di 10 Kecamatan	10 Dokumen	100	12 Bulan	
7	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Kelurahan di 10 Kecamatan	10 Dokumen	100	12 Bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)
Tel/Fax(0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Supriadi, SE
Jabatan : Pengolah Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Bidang PHA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak kedua,**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

Muhammad Firman, S.Sos. M.Si
NIP. 19670422 198609 1 001

Pihak Pertama,

Edy Supriadi, SE
NIP. 19730223 201001 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyiapkan data Pembuatan Program Pengembangan untuk menghasilkan kebenaran informasi kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah data yang menghasilkan Kebenaran Informasi dan partisipasi	2 Dokumen	100	12 Bulan	
2	Mengetik rekapitulasi, mengumpulkan dan mencatat perkembangan pendataan mengenai Kota Layak Anak (KLA) ,di tahun berjalan	Jumlah data yang dikumpulkan di tahun berjalan	12 Dokumen	100	12 Bulan	
3	Mengumpulkan dan memeriksa data Update Mengenai Kota Layak Anak (KLA) dari OPD, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah data yang dikumpulkan 10 Kecamatan	12 Dokumen	100	12 Bulan	
4	Mengolah dan menginput data mengenai Kota Layak Anak (KLA) dalam bentuk yang ditetapkan	Jumlah data yang di sajikan dalam bentuk yang ditetapkan	1 Laporan	100	12 Bulan	
5	Mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis serta informasi mengenai Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pedoman Juknis yang di olah	1 Dokumen	100	12 Bulan	
6	Mengetik Laporan Kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah Laporan Kegiatan	2 Laporan	100	12 Bulan	
7	Mendokumentasikan dan mengedit foto kegiatan	Jumlah Dokumentasi kegiatan	200 Lembar	100	12 Bulan	
8	Mengerjakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Membantu atasan langsung perihal kegiatan	1 Dokumen	100	12 Bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arbainah
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kualitas Hidup Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Awe Ului, S.KM, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Awe Ului, S.KM, M.Kes
NIP. 19690804 199402 2 002

Pihak Pertama

Arbainah
NIP. 19671225 200112 2 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar yang telah di disposisi oleh kepala bidang pada kepala seksi di bidang kualitas keluarga	Terlaksananya pencatatan surat masuk dan surat keluar	90 Dokumen	100	1 Tahun	
2	Jumlah mengarsipkan surat masuk dan surat keluar yang telah ditindak lanjuti	Terseunnya penggandaan surat atau berkas	20 Dokumen	100	1 Tahun	
3	Jumlah menggandakan surat atau berkas sesuai arahan bidang	Terselesainya penggandaan surat atau berkas	30 Dokumen	100	1 Tahun	
4	Jumlah pendistribusian surat menyurat	Terlaksananya kegiatan pendistribusian surat	20 Dokumen	100	1 Tahun	
5	Jumlah menginput data di bidang kualitas keluarga	Terinputnya data	10 Dokumen	100	1 Tahun	
6	Jumlah mengurus SK , Perwali , PP ke Walikota	Terselesainya pengurusan SK dan Perwali ke Walikota	5 Dokumen	100	1 Tahun	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

J alan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax(0541) 743307, Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Hartono
Jabatan : Pengadministrasi Umum Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2023

Pihak Kedua

Muhammad Firman, S.Sos, M.Si
NIP. 19670422 198609 1 001

Pihak Pertama

Edi Hartono
NIP. 19711008 201001 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			KUALITAS /OUTPUT	KUALITAS/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengumpulkan data KLA dari OPD.	Jumlah data KLA dari OPD.	1 Laporan	100	12 Bulan	
2	Mengumpulkan dan merekap data pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan. (Zoss, RBRA, Pernikahan Anak, Panti/LKSA, Paud, Data Kecelakaan Lalulintas Pd Anak dll)	Jumlah data pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan. (Zoss, RBRA, Pernikahan Anak, Panti/LKSA, Paud, Data Kecelakaan Lalulintas Pd Anak dll)	9 Dokumen	100	12 Bulan	
3	Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pelatihan pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pelatihan pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	1 Laporan	100	12 Bulan	
4	Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	1 Laporan	100	12 Bulan	
5	Mengadministrasikan surat masuk dan keluar pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	Jumlah surat masuk dan keluar pada subkoordinator pengasuhan dan lingkungan.	50 Surat	100	12 Bulan	
6	Mengetik laporan kegiatan.	Jumlah laporan kegiatan.	2 Laporan	100	12 Bulan	
7	Mendokumentasikan dan mengedit foto kegiatan.	Jumlah mengedit dokumentasi kegiatan	100 Lembar	100	12 Bulan	
8	Menyiapkan Bahan SPJ Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Bahan SPJ sSub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	12 Laporan	100	12 Bulan	
9	Menyiapkan Bahan SPJ Sub Kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan SPJ Sub Kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	100	12 Bulan	
10	Melaksanakan tugas ² yang diberikan oleh atasan.	Jumlah tugas yg diberikan atasan.	10 Kali	100	12 Bulan	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERIANSYAH
Jabatan : STAF SUB KOORDINASI DAN DATA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYARIFUDDIN NUR,SE.MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 JANUARI 2023

Pihak Kedua

SYARIFUDDIN NUR,SE.MM
NIP. 19741105 200112 1 009

Pihak Pertama

HERIANSYAH
NIP. 19820113 200901 1002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KETERANGAN
			KUALITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA	
1	Menjalankan program dan kegiatan yang sudah di susun sesuai dengan bidang tugas.	Jumlah laporan	12 laporan	100%	12 bulan	-	
2	Menginput RKA sub Koordinasi dan Data Perempuan Korban Kekerasan.	Terinputnya RKA kegiatan	1 dokumen	100%	12 bulan	-	
3	Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kekerasan dan penanganan kekerasan pada perempuan.	Jumlah data kekerasan perempuan di 10 kecamatan	10 laporan	100%	12 bulan	-	
4	Memperiapkan bahan monitoring dan evaluasi terkait penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah data laporan yang sudah tervalidasi dan terlaksana	10 Laporan	100%	12 bulan	-	
5	Membuat dan mengumpulkan data dan informasi kekerasan dan penanganan kekerasan pada perempuan sebagai bahan analisis dan kajian data.	Jumlah laporan	10 Laporan	100%	12 bulan	-	
6	Memperiapkan bahan dan data terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD ataupun stakeholder dalam penanganan kekerasan pada perempuan.	Jumlah Kegiatan	1 Berkas	100%	12 bulan	-	
7	Melakukan update data dan sinkronisasi data perempuan korban kekerasan	Jumlah laporan	1 Dokumen	100%	12 bulan	-	
8	Membuat dan mengetik laporan bulanan	Jumlah Laporan	12 Laporan	100%	12 bulan	-	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 01 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Tel / Fax (0541) 743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Web <http://dp2pa.samarinda.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusdiansyah Noor
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Bidang Perlindungan Khusus Anak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. Wiyono, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

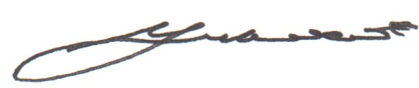
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua,


H.WYONO, S.Sos, M.Si
NIP.19650221 199003 1 017

Pihak Pertama,


YUSDIANSYAH NOOR
NIP.19810728 200901 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Irma Agustina, SE
Jabatan : Pengadminstrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Firman. S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2023

Pihak Kedua

MUHAMMAD FIRMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 1967044221986091001

Pihak Pertama

AJI IRMA AGUSTINA, SE
NIP. 19800824 201001 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
Jalan Bhayangkara No. 4 (Komplek Polsek Samarinda Kota)
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75121

Telpon Pengaduan +62 823-2442-1313 Email: uptppa.samarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eti, SE
Jabatan : Kasub.Bag. Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd
Nip. 196707131991031013

Samarinda, 19 Juni 2023

Pihak Pertama,

Eti, SE
Nip. 197407122007012032